

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, termasuk mengejar percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006). Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah yaitu dilihat dari proses pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya setiap negara memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi pada kenyataannya di negara berkembang seperti Indonesia sering terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di seluruh daerah, sehingga menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah apabila dibandingkan dengan daerah lainnya.

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat adanya perbedaan ini potensi atau kemampuan pada suatu wilayah mendorong proses pembangunan yang berbeda pula. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada suatu wilayah biasanya terdapat wilayah maju dan

wilayah terbelakang. Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal (perbedaan distribusi pendapatan), dan secara horizontal (perbedaan antar wilayah maju dan terbelakang), (Sjafrizal 2008, dalam Dwiputra 2018).

Pemerataan pembangunan ekonomi merupakan unsur serta bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi tidak diiringi dengan pemerataan justru dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat serta dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga dapat mendorong timbulnya keresahan.

Indikator yang dapat memperlihatkan kemajuan suatu daerah dalam peningkatan kemakmuran masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Diantaranya yaitu; pertama, dengan melihat pada perkembangan PDRB dengan harga konstan yang sudah dapat dihasilkan dalam periode perencanaan, dengan alasan karena nilai PDRB tersebut merupakan hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pada suatu daerah dalam periode tertentu. Kedua, nilai pendapatan perkapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk di tahun yang sama. Indikator nilai PDRB perkapita ini merupakan indikator kemakmuran daerah yang lebih baik serta dapat dibandingkan dengan daerah lainnya. Ketiga, mengingat kemakmuran pada suatu wilayah bukan hanya bersifat materi saja, maka indikator lainnya serta bersifat komprehensif adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Angka IPM pada dasarnya yaitu gabungan dari tiga unsur kemakmuran yaitu pendapatan (daya beli masyarakat), pendidikan dan kesehatan. Secara singkat, pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak hanya dari segi ekonomi saja tetapi juga non ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 menurut data BPS berada pada angka 5,17%. Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang positif tersebut ditunjang dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang juga menunjukkan angka yang positif juga.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau-Pulau di Indonesia

Pulau	PDRB ADHK 2010		Pertumbuhan
	(miliar rupiah)		Ekonomi
	2017	2018	tahun 2018
Sumatera	2.132.579	2.229.599	4,55%
Jawa	5.857.508	6.192.952	5,73%
Bali, Nusa Tenggara	302.267	310.446	2,71%
Kalimantan	842.972	875.943	3,91%
Sulawesi	603.147	643.216	6,64%
Papua, Maluku	256.751	274.772	7,02%
Indonesia	9.912.928	10.425.397	5,17%

Sumber: Publikasi BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 berada pada angka yang positif, namun persentase pertumbuhan ini masih kurang merata antar pulau. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang masih kurang merata, nilai PDRB pun terlihat sangat timpang antar pulau.

Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan mempunyai nilai PDRB yang jauh melebihi nilai PDRB pulau lain. Pulau Jawa menyumbang PDRB terhadap PDB nasional tahun 2018 merupakan yang terbesar yaitu sebesar 5,73%. Besarnya sumbangan PDRB pulau Jawa terhadap PDB nasional ternyata masih terdapat permasalahan ekonomi di daerahnya, yaitu timpangnya distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh PDRB perkapita.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 maupun 2018, perolehan PDRB per kapita DKI Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding dengan provinsi di pulau Jawa. Pada tahun 2018, PDRB per kapita DKI Jakarta sebesar 165 juta rupiah. Pada tahun yang sama, PDRB per kapita DI Yogyakarta berada paling rendah apabila dibandingkan dengan provinsi di pulau Jawa yaitu sebesar 25 juta rupiah dan Jawa Barat berada pada tingkat rendah ke empat di pulau Jawa yaitu memiliki nilai PDRB per kapita sebesar 29 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa di Pulau Jawa sendiri yang merupakan pusat kegiatan perekonomian, pencapaian kesejahteraan ekonominya masih belum merata.

Tabel 1.2 PDRB per Kapita ADHK 2010 Menurut Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	PDRDB per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	
	2017	2018
DKI Jakarta	157.637	165.872
Jawa Barat	27.971	29.161
Jawa Tengah	26.089	27.287
DI Yogyakarta	24.534	25.776
Jawa Timur	37.724	39.588
Banten	32.948	34.202

Sumber: Publikasi BPS Indonesia

Besarnya perbedaan pendapatan per kapita antar provinsi di Pulau Jawa tersebut diikuti dengan Indeks Gini yang cukup tinggi di beberapa provinsi. Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, data BPS menunjukkan Indeks Gini di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 0,39. DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 0,43; 0,41; 0,40 dan 0,39. Tiga provinsi di pulau, DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta yang

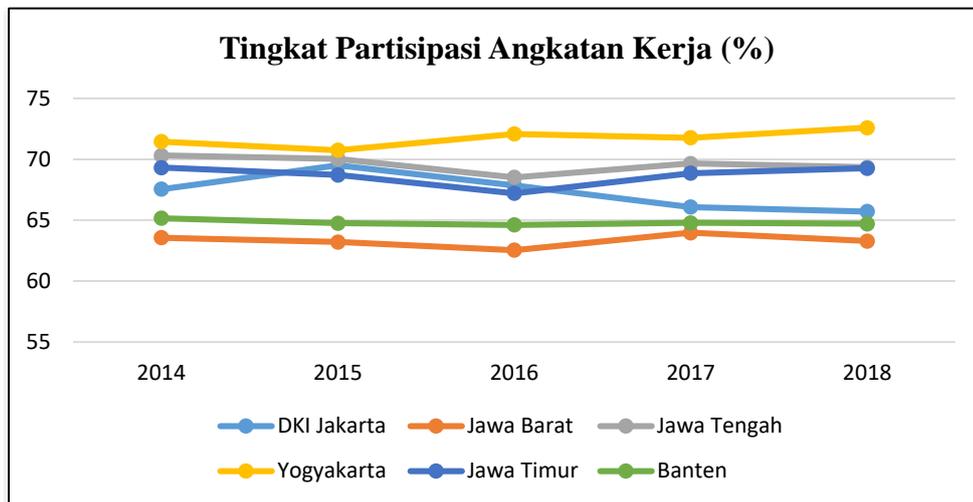
merupakan provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi dan terendah adalah provinsi yang tercatat dengan Indeks Gini melebihi rata-rata nasional.

Masalah besar yang terjadi di banyak negara berkembang seperti Indonesia yaitu masih besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan (Tulus, 2011). Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan perekonomian serta pemerintahan, nyatanya kondisi ini masih menimbulkan masalah pembangunan dengan melihat dari sisi ketimpangan distribusi pendapatan yang masih tinggi.

Pada teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan ekonomi salah satunya bersumber dari kuantitas dan kualitas tenaga kerja, yang mana tentu digambarkan oleh jumlah penduduk dan pendidikan yang lebih baik. Kuantitas tenaga kerja dilihat dari jumlah penduduk, dimana penelitian ini digambarkan oleh seberapa besar jumlah tenaga kerja yang dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan kualitas tenaga kerja digambarkan oleh tinggi atau lamanya pendidikan formal yang ditempuh.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu angkatan kerja yang bekerja atau yang disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Angkatan kerja yang bekerja akan terbentuk menjadi besar apabila memiliki jumlah penduduk yang besar juga. Akan tetapi pertumbuhan penduduk yang besar mempunyai kecenderungan membawa kearah ketimpangan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi yang lambat apabila tidak dapat mengatasi masalah penyerapan angkatan kerja dalam lapangan pekerjaan

Grafik 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %) Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Indonesia, diolah

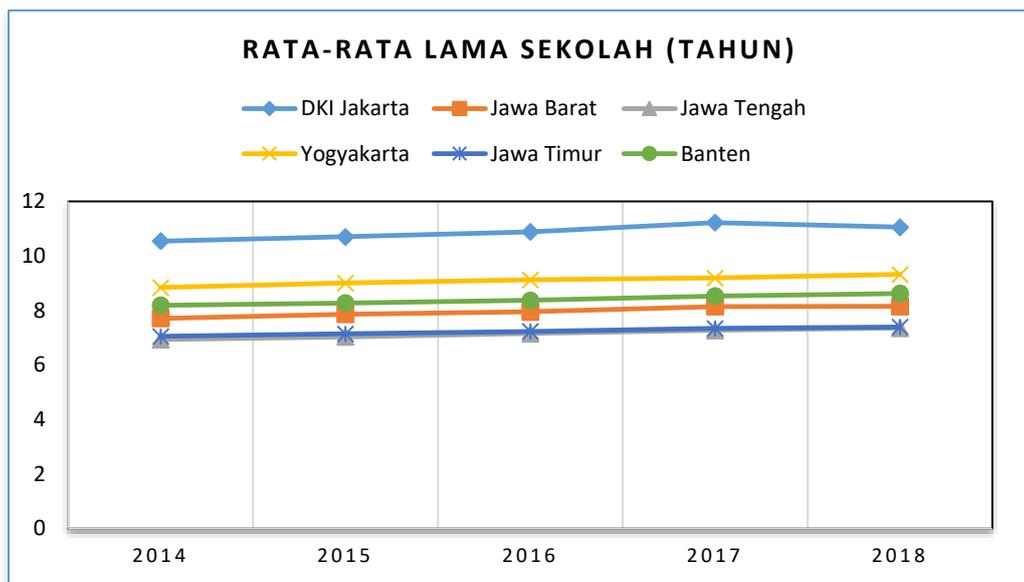
Berdasarkan grafik 1.1 pada lima tahun terakhir di Pulau Jawa, nilai TPAK tertinggi berada di Provinsi Yogyakarta, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan nilai TPAK paling rendah di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang masih rendah, karena tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat. Dalam arti ketika TPAK meningkat maka dapat meningkatnya pertumbuhan ekonomi, begitu pun dengan pendapatan perkapita.

Pada teori pertumbuhan neoklasik yang mana kualitas tenaga kerja digambarkan oleh tingginya pendidikan formal yang ditempuh. Adapun salah satu isu terkait pengaruh pendidikan terhadap pendapatan yaitu ketimpangan pendapatan. Pada awal tahun 1980-an, ketimpangan pendapatan di negara-negara barat mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Ashenfelter dan rouse, 2000). Mereka

menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat yang menjanjikan yang dapat meningkatkan kemampuan (*skill*) serta pendapatan individu. Oleh sebab itu, kebijakan terkait pendidikan mempunyai potensi dapat mengurangi atau pun meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian ini salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan adalah pendidikan, yang dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat.

Grafik 1.2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Indonesia, diolah

Berdasarkan grafik 1.2 pada lima tahun terakhir di Pulau Jawa, rata-rata lama sekolah tertinggi berada di DKI Jakarta. Kemudian diikuti oleh Yogyakarta, dan Jawa Barat berada di peringkat keempat. Sedangkan rata-rata lama sekolah paling rendah di Pulau Jawa terdapat di Jawa Tengah. Tetapi grafik diatas menunjukkan pada setiap Provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan rata-rata

lama sekolah, semakin banyak masyarakat yang mampu mengenyam pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula keahlian yang dimiliki, sehingga akan meningkatkan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian. Ketika perekonomian mengalami peningkatan maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan perkapita, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bruce Domazlicky 2005 dimana poulasi penduduk dengan ijazah lebih tinggi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, maka penulis ingin mengetahui bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan serta bagaimana pengaruh PDRB per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyusun dalam penulisan skripsi ini mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi ketimpangan pendapatan, perkembangan PDRB perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019?
2. Bagaimana Pengaruh PDRB perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 s/d 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 s/d 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang sejenis berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan,

khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Sebagai acuan penelitian pada penelitian sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Ketimpangan atau kesenjangan dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupannya (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan yang mana dapat terpenuhinya kebutuhan dasar seperti yang terlihat dari rumah layak huni, terpenuhinya akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan dan kesehatan, atau pun keadaan dimana seseorang mampu memenuhi utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani (Todaro dan Stephen C. smith).

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan serta tingkat kesehatan (BPS Indonesia 2014).

2.1.2 Pembangunan Ekonomi

Todaro (2011:18) menjelaskan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan.

Pengertian pembangunan sangat luas, bukan sekedar bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi pertahun saja. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi serta taraf hidup masyarakat. Dengan adanya cakupan di atas, maka pada umumnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 2004).

Menurut Todaro (2006), pembangunan di semua negara memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semua itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi saja, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri, baik individu maupun bangsa.
- c) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa, dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya terhadap orang lain atau bangsa lain, tetapi juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

2.1.3 Definisi Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah yang lain merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan terdapat perbedaan dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson 1965, dalam Dwiputra 2018). Ketimpangan yang sering dibahas adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan, terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif anatar potensi serta tingkat kesejahteraan dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah.

Falsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah tidak bermaksud membatasi arus modal. Pada dasarnya arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang memiliki potensi atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari apabila arus modal lebih terkonsentrasi di wilayah akan kaya sumber daya dan kota-kota besar yang memiliki sarana serta prasarananya lebih lengkap yang mengakibatkan jumlah penduduk menganggur di Provinsi yang berkembang akan meningkat (Hartono, 2008).

Berikut beberapa definisi ketimpangan menurut teori para ahli dalam Mulyadi, dkk. 2014 :

- 1) Menurut A.Chaniago Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.
- 2) Menurut Winarno Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.
- 3) Menurut Haughton dan Shahidur R. Khandker Ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidak-adilan yang terjadi dalam proses pembangunan.
- 4) Menurut Aswidah Ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Definisi Pendapatan

pendapatan adalah jumlah yang dapat dibelanjakan individu atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu, sementara nilai kekayaannya tetap utuh.

Dalam melakukan pengukuran, nilai konsumsi ditambah perubahan nilai kekayaan harus sama dengan jumlah penerimaan, keuntungan dari penjualan aktiva, nilai tunjangan tambahan dan produksi untuk konsumsi keluarga dan sewa yang diperoleh. Namun, dalam praktek, hal ini sulit untuk diterapkan, karena dalam pengukuran perubahan kekayaan terdapat penilaian kembali persediaan modal. Salah satu alternatif dalam mengukur pendapatan adalah melalui pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan faktor yang relevan dalam penilaian kesejahteraan (Hicks, 1993 dalam Damarjati, 2010).

Rahardja dan manurung, 2005 dalam Dwiputra 2018 membagi tiga bagian sumber penerimaan rumah tangga sebagai pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan dari gaji dan upah yang merupakan balas jasa sebagai tenaga kerja. Besar gaji/upah dipengaruhi produktivitas, diantaranya tingkat keahlian (*skill*), kualitas modal manusia (*human capital*), dan kondisi kerja (*working condition*).
2. Pendapatan dari aset produktif, berupa pemasukan balas jasa penggunaan, diantaranya aset finansial (deposito, modal dan saham), dan aset bukan finansial (rumah, tanah dan bangunan).
3. Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*), berupa pendapatan yang diterima sebagai balas jasa atas input yang diberikan, misalnya dalam bentuk subsidi, tunjangan atau jaminan sosial.

2.1.5 Definisi Ketimpangan Pendapatan

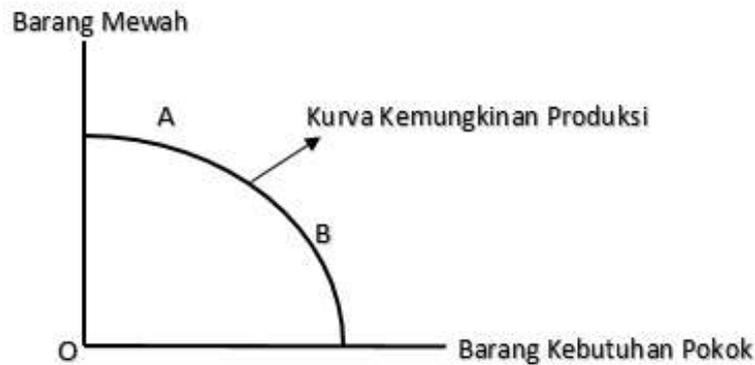
Penghapusan kemiskinan serta meminimalisir ketidakmerataan distribusi pendapatan ialah inti dari proses pembangunan. Meskipun titik perhatian pada permasalahan ketidakmerataan sering kali tercurah pada masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan serta harta kekayaan, hal tersebut ialah bagian kecil dari permasalahan ketidakmerataan yang terdapat di negara sedang berkembang (Arsyad, 2015).

Apabila suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi maka masalah yang terjadi yaitu ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendapatan yang terjadi menunjukkan bahwa pendapatan yang rendah dinikmati sebagian besar penduduk dan pendapatan yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Ketimpangan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi
- 2) Ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat melemahkan stabilitas sosial serta solidaritas
- 3) Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dapat dipandang tidak adil

Terdapat dua cara sederhana untuk mengetahui permasalahan distribusi pendapatan ialah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi (Lincoln Arsyad, 2015). Dalam hal ini suatu perekonomian diasumsikan menjadi dua jenis

barang, yaitu barang kebutuhan pokok serta barang mewah, dimana produksinya dianggap terjadi disepanjang kurva kemungkinan produksi.



Sumber: Lincoln Arsyad, 2015

Gambar 2.1 Kurva Kemungkinan Produksi

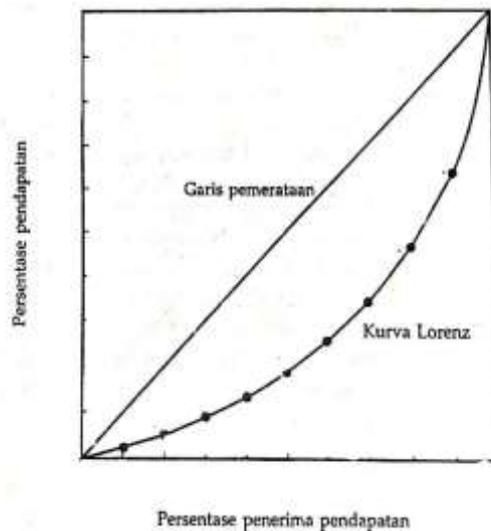
Kurva diatas menggambarkan kombinasi dari dua jenis barang, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah, yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Diasumsikan pada titik A dan B menghasilkan pendapatan nasional yang sama. Titik A lebih banyak menghasilkan barang mewah daripada barang pokok. Sedangkan pada titik B lebih banyak menghasilkan barang kebutuhan pokok dibandingkan barang mewah. Pada suatu negara, dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, semakin timpang distribusi pendapatan, maka permintaan agregat akan lebih dipengaruhi oleh konsumsi orang kaya. Posisi produksi barang konsumsi berada di titik A, dimana biasanya orang kaya lebih banyak mengkonsumsi barang-barang mewah dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok. Sehingga, keadaan ini tentu dapat menyebabkan kelompok miskin semakin menderita.

2.1.6 Indikator Ketimpangan Pendapatan

Terdapat beberapa cara untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Studi tentang ketimpangan pendapatan biasanya digunakan alat ukur ketimpangan pendapatan adalah:

A. Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Todaro juga menjelaskan metode lain untuk menganalisis ketimpangan pendapatan, yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan yang diterima selama satu tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (garis pemerataan), semakin timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan.



Sumber: Todaro (2011)

Gambar 2.2 Kurva Lorenz

B. Koefisien Gini Rasio

Cara lainnya yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan adalah menggunakan koefisien gini rasio. Koefisien gini rasio adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada hakikatnya koefisien gini rasio untuk negara yang tingkat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 sampai 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata berkisar 0,20-0,35 (Todaro, 2011).

Koefisien gini dihitung dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal dengan kurva lorenz dibandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar dimana kurva lorenz tersebut berada. Secara matematis rumus koefisien gini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} x (Fc_i + Fc_{i-1})$$

Keterangan:

GR = *Gini Ratio* / Indeks Gini

F_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Teori Schumpeter (1934) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan stabil yang terjadi melalui kenaikan tabungan, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah negara maju.

Sukirno (2000), Perbedaan istilah dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

Pembangunan ekonomi yaitu:

1. Peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan GDP pada satu tahun tertentu melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh perbaikan dan modernisasi dalam struktur ekonomi (struktur produksi dan struktur kelembagaan) yang umumnya masih bercorak tradisional.

Pertumbuhan ekonomi:

3. Kenaikkan dalam GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak.

Menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, ialah kenaikan

seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu dapat menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.

Menurut Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya”. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen; pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

1.1.8 PBRB per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Kuznets (dalam Lincoln, 2010) pada analisisnya menjelaskan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya kesenjangan ekonomi diantara masyarakat. Dalam analisisnya Kuznet menemukan relasi antara tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Tetapi pada tahap berikutnya seiring pendapatan per kapita meningkat distribusi pendapatan akan membaik.

Penelitian Anis Tunas Sylviarani 2017 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Salah satu tolok ukur kesejahteraan penduduk yaitu meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga dapat menurunkan atau mengurangi disparitas pendapatan.

1.1.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Ketimpangan Pendapatan

Penduduk dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 disebutkan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Yang tergolong dalam definisi tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Pada dasarnya tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan atas dasar batas usia kerja. Bank Dunia menyatakan bahwa batas usia kerja yaitu 15 sampai 64 tahun. Tetapi sejak tahun 1971-1999 batas usia kerja di Indonesia yaitu 10 tahun keatas. Batas usia 10 tahun tersebut didasari oleh kenyataan yang ada, bahwa di daerah pedesaan sudah banyak penduduk yang bekerja. Namun sejak tahun 2001 Indonesia mengikuti anjuran *Internasional Labour Organisation (ILO)*, yakni mengubah batas maksimal usia kerja di Indonesia dari usia 10 tahun menjadi 15 tahun.

Kemudian, angkatan kerja adalah salah satu faktor yang positif dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan pengertian bahwa semakin banyak partisipasi angkatan kerja yang bekerja, maka akan meningkatkan tingkat produksi yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan pendapatan.

Penduduk yang dimaksud angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja serta penduduk yang sedang mencari kerja. Sedangkan penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja yaitu penduduk yang masuk usia kerja tetapi sedang tidak bekerja, seperti siswa sekolah maupun perguruan tinggi, pensiunan, mengurus rumah tangga dan lain-lain.

TPAK merupakan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang dapat memberika gambaran yang jelas hingga seberapa jauh sebenarnya penduduk yang termasuk usia kerja yang benar-benar aktif dan tidak aktif dalam bekerja (Simanjuntak, 2001:36). Jadi, TPAK adalah perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk dalam usia kerja.

Formulasi dalam perhitungan TPAK merupakan rasio atau perbandingan antara angkatan kerja yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia kerja), formulasi TPAK sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Angkatan Kerja (sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan)

Y = Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun)

Dalam penjelasannya, TPAK merupakan rasio atau perbandingan antara angkatan kerja yang bekerja dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun). Dalam hal ini TPAK merupakan bagian dari tenaga kerja dan penduduk. Selain itu, TPAK merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berlangsungnya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pada peningkatan pendapatan. Ketika nilai TPAK tinggi atau meningkat, maka akan mengurangi atau menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, karena semakin tinggi TPAK menggambarkan semakin banyak orang yang bekerja. Oleh sebab itu, TPAK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

1.1.10 Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan UU No. 20 pasal 1 ayat 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar

peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya serta memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pribadi yang cerdas, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan merupakan faktor penting dalam investasi sumber daya manusia (Wahyuni & Monika, 2016). Disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Sumber daya manusia yang berpendidikan tentu akan menjadi modal utama bagi pembangunan nasional terutama untuk pertumbuhan ekonomi, semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini terjadi disebabkan oleh sumber daya manusianya, sehingga pemerintah lebih mudah untuk dapat menggerakkan pembangunan nasional.

Asumsi yang berlaku secara umum, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan individu, maka semakin tinggi pula kualitas individu tersebut, baik dilihat dari pola pikir maupun pola tindakannya.

Penelitian Bruce Domazlicky (2005) mengatakan bahwa populasi penduduk dengan ijazah lebih tinggi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan serta keahlian (*skill*) akan meningkat, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan pendapatan (Todaro, 2006).

1.1.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Masruri dan Susilo : 2016 “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPAK, dan Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”	Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2014.	Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, serta tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa

			Tengah pada tahun 2011-2014.
2	Reza Maulana Dwiputra : 2018 “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendaootan di Indonesia perode 2011-2016”	Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia pada 3 Provinsi.	Hasil dari penelitian variabel yang memiliki pengaruh signifikan negatif adalah variabel PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan IPM. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan positif adalah variabel Pengeluaran Pemerintah.
3	Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksani : 2017 “Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-	Menganalisis kondisi ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2011-2015 dengan	Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015

	Faktor yang Mempengaruhinya”	menggunakan empat variabel independen yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan jumlah penduduk.	adalah variabel IPM dengan arah koefisien positif.
4	Anis Tunas Sylviarani : 2017 “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015”	Menganalisis pengaruh inflasi, IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, UMR terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.	Variabel inflasi dan PDRB memiliki hubungan negatif dan signifikan pada distribusi pendapatan. Sedangkan variabel IPM, Tingkat Pengangguran, dan UMR memiliki hubungan positif dan signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan.
5	Bruce Domazlicky : 2005 “Income Inequality in Rural Southeast Missouri”	Menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan di Missouri Tenggara dengan menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dapat

		<p>faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu jumlah penduduk dibawah usia 18 tahun, persentase kepala keluarga perempuan, TPAK perempuan, tingkat pendapatan dan persentase penduduk dengan ijazah sekolah menengah atas (tidak ada gelar yang lebih tinggi).</p>	<p>dilakukan dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja wanita dan juga populasi penduduk dengan ijazah lebih tinggi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsentrasi ekonomi memberikan dampak kepada pasar tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja yang lebih dan mengurangi ketimpangan pendapatan.</p>
--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang masih sulit untuk dituntaskan di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah sedang gencar-gencarnya menjalankan pembangunan ekonomi dalam upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi di wilayah Indonesia dan dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan pendapatan perkapita akan semakin tinggi sehingga dapat mengurangi ketimpangan.

Masalah distribusi pendapatan merupakan bagian terpenting dalam mengukur pembangunan ekonomi, hal ini karena dengan naiknya distribusi pendapatan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sukirno (2000) bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa hanya 20% penduduk yang memiliki distribusi pendapatan yang tinggi, sedangkan 80% bagi penduduk yang memiliki distribusi pendapatan menengah ke bawah (Ahluwalia, 1997).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Namun pertumbuhan bukan satu-satunya indikator acuan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nasional pada kenyataannya tidak merata di seluruh provinsi, khususnya di provinsi Jawa Barat. PDRB perkapita yang dapat dijadikan tolok ukur kesejahteraan masyarakat masih belum terdistribusi secara merata. Tidak hanya itu tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pendidikan yang masih

dibawah rata-rata dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan ini yang menyebabkan munculnya ketimpangan pendapatan, khususnya di provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga variabel bebas yang akan diajukan pengaruhnya terhadap satu variabel terikat ialah ketimpangan pendapatan. Variabel bebas tersebut yaitu PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pendidikan.

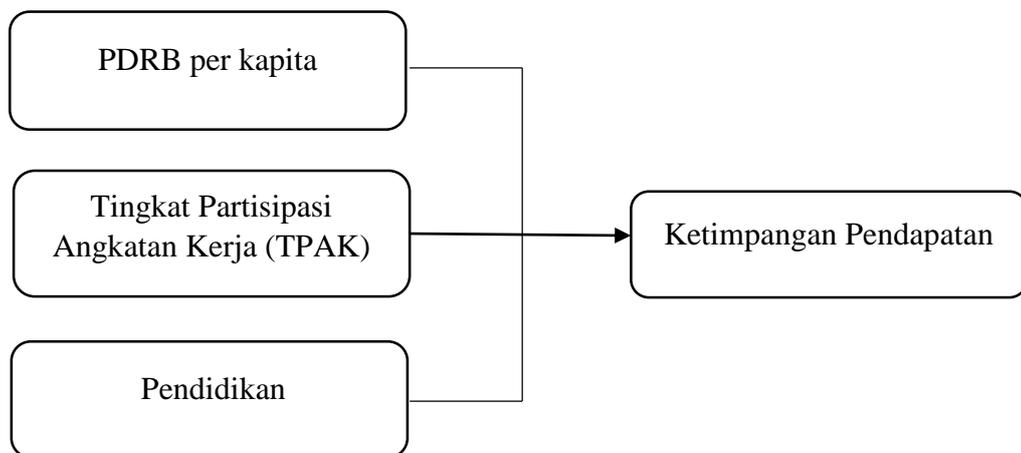
Variabel PDRB perkapita dipilih karena perbedaan, perolehan PDRB perkapita cukup bervariasi antar wilayah khususnya di Provinsi Jawa Barat, yang mana Provinsi di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian justru menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Menurut Kuznets pada awal tahap pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan cenderung membaik. PDRB perkapita yang menunjukkan distribusi pendapatan diketahui berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anis Tunas Sylviarani 2017 dimana PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut teori Solow (dalam Najiah, 2013) mengemukakan bahwa kombinasi antara jumlah modal dan tenaga kerja yang digunakan akan menghasilkan tingkat output serta tingkat efisiensi yang berbeda. Tingkat partisipasi angkatan kerja ialah salah satu faktor yang mempengaruhi besaran output suatu perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan output yang tinggi pula yang mempengaruhi PDRB

begitupun pada pendapatan perkapita. Oleh sebab itu secara teoritis, TPAK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi kualitas orang tersebut, baik dilihat dari pola pikir maupun tindakannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan pendapatan (Todaro, 2006). Apabila tingkat pendidikan mengalami kenaikan, maka dapat dilihat dari tingkat produktivitas masyarakat akan lebih baik, sehingga akan menurunkan atau mengurangi disparitas pendapatan. Oleh sebab itu secara teoritis, tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Bruce Domazlicky : 2005) yang mana populasi penduduk dengan ijazah lebih tinggi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Secara garis besar kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PDRB perkapita diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Pendidikan/rata-rata lama sekolah diduga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan ataupun memberi gambaran terhadap suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2012:29). Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:14). Berdasarkan tingkat ekplanasi, penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data menggunakan regresi panel dengan data *time series* selama 10 tahun dan data *cross section* 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

3.1.1 Model Analisis Data Panel

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel. Analisis data panel merupakan kombinasi dari deret waktu (*time series*) dengan kerat lintang (*cross section*). Menurut Gurajati (2007), keunggulan data panel dibandingkan dengan data *time series* dan *cross section* adalah :

- 1) Estimasi data panel menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.

- 2) Data panel lebih informatif, bervariasi, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), mengurangi koleniaritas antar variabel serta lebih efisien.
- 3) Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari *cross section*.
- 4) Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh *time series* atau *cross section*.
- 5) Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks.
- 6) Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui dua pendekatan, antara lain :

a. Fixed Effect Model

Pada pendekatan *Fixed Effect* merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menemukan adanya perbedaan *intercept*. Pendekatan ini didasarkan adanya perbedaan *intercept* individu namun *intercept*nya sama antar waktu. Model ini mengasumsikan bahwa *slope* tetap antar individu dan antar waktu.

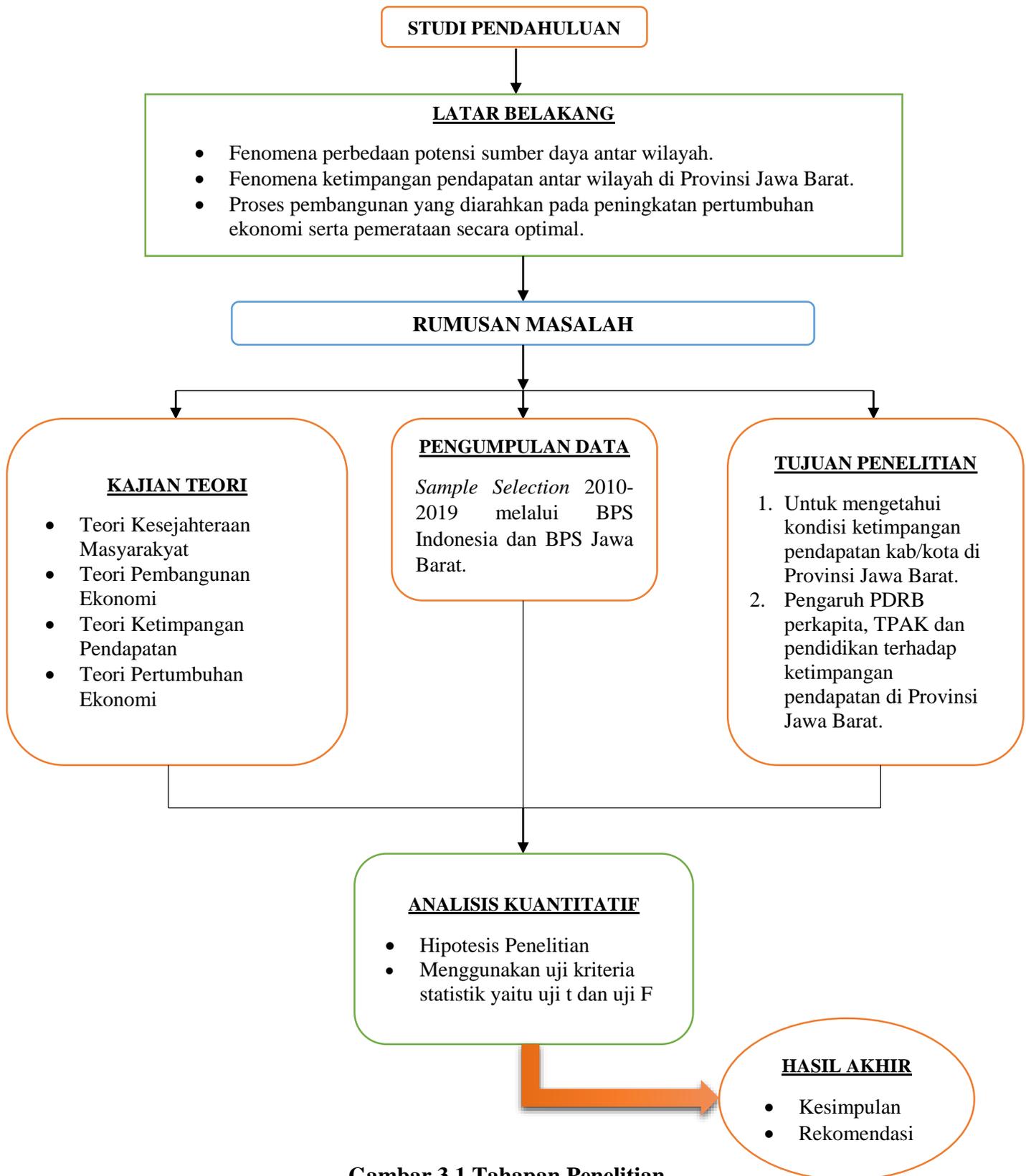
b. Random Effect Model

Mengestimasi data panel dengan *fixed effect* melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidak pastian model yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat menggunakan variabel residual dikenal sebagai metode

random effect. Model ini akan memilih estimasi data panel, dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian atau cara penelitan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.3 Definisi Variabel dan Oprasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel penelitian, yaitu PDRB perkapita (X_1), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (X_2), pendidikan (X_3) dan ketimpangan pendapatan (Y). Penjelasan lebih jelas definisi oprasional dan kaitannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi dan Oprasionalisasi Variabel

No	Jenis Variabel	Nama Variabel	Oprasional Variabel	Satuan
1	<i>Dependen</i>	Ketimpangan Pendapatan (Y)	Ketimpangan pendapatan menggunakan ukuran Gini Rasio pada tingkat kab/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat	Koefisien Gini Rasio (0-1)
2	<i>Independen</i>	PDRB perkapita (X_1)	PDRB perkapita yang digunakan adalah PDRB perkapita atas harga konstan pada tingkat kab/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.	Rupiah

3	<i>Independen</i>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X ₂)	Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerj (TPAK) setiap kab/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019. Data TPAK diperoleh dari hasil hasil BPS.	Persentase (%)
4	<i>Independen</i>	Pendidikan (X ₃)	Dalam penelitian ini pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama (RLS) sekolah dari tiap kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Data RLS diperoleh dari hasil BPS.	Tahun

3.4 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data panel, yaitu gabungan data *time series* dari tahun 2010-2019 (10 tahun) dan data *cross section* dari 27 kabupaten/kota di Proinsi Jawa Barat. Data yang diperlukan antara lain:

1. Gini Rasio pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2019.
2. PDRB perkapita pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2019.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2019.
4. Rata-Rata Lama Sekolah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2019.

Adapun data yang diperoleh merupakan hasil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumenter yaitu publikasi BPS secara nasional maupun regional yang mencakup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010-2019. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Nana Syaodih, 2009:221). Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan dengan metode regresi data panel atau *Panel Pooled Data*. Model regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBPK_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 RLS_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

GR = Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

PDRBPK = PDRB perkapita (Rupiah)

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi

i = 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

t = Tahun 2010-2019

e = *error*

3.7 Pengujian Model

Penentuan model terbaik antara *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* menggunakan dua teknik estimasi model. Dua teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Uji digunakan *Hausman test* digunakan untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel.

3.7.1 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis nolnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel yaitu model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel yaitu *Fixed Effect Model*. Hipotesis yang dibentuk dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

1. Jika Hausman Test menerima H_1 atau p value $< 0,05$ maka metode yang dipilih adalah *fixed effect*.
2. Jika Hausman Test menerima H_0 atau p value $> 0,05$ maka metode yang dipilih adalah *random effect*.

3.8 Pengujian Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dilihat dari nilai probabilitas *Jarque-Bera* (JB). Apabila nilai probabilitas $> 5\%$ maka residual terdistribusi dengan normal.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas keberadaan dari hubungan linier yang sempurna, diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Mengikuti *rule of thumb*, apabila koefisien antar variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinieritas (Gujarati, 2004: 359).

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinieritas yaitu sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat multikolinearitas

H_1 = Terdapat multikolinearitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai koefisien korelasi $> 0,8$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat multikolinieraitas.
2. Jika nilai koefisien korelasi $< 0,8$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat multikolinieraitas.

1.8.3 Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak adanya autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan periode $t-1$. Jika terjadi auto korelasi maka dalam persamaan regresi linier tersebut terdapat masalah, karena hasil yang baik seharusnya tidak ada indikasi autokorelasi. Untuk mendeteksi

adanya autokorelasi biasanya menggunakan metode Durbin-Waston (DW) dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat autokorelasi

H_1 = Terdapat autokorelasi

Untuk mendeteksi terdapat autokorelasi, dapat dilihat dari nilai DW dan tingkat signifikan (α) = 5%, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika $d < d_L$, maka H_0 ditolak : terdapat serial korelasi positif antar variabel.
- b) Jika $d > d_L$, maka H_0 diterima : terdapat serial korelasi negatif antar variabel.
- c) Jika $d_U < d < 4 - d_U$, maka H_0 diterima : tidak terdapat serial korelasi positif maupun negatif antar variabel.
- d) Jika $d_L < d < d_U$ atau $4 - d_U < d < 4 - d_L$: tidak dapat diambil kesimpulan, maka pengujian dianggap tidak meyakinkan.

3.8.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengamatan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat dikatakan homoskedastisitas yang merupakan syarat suatu model regresi.

Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas yaitu:

H_0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_1 = terdapat heteroskedastisitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut:

1. Jika P value $\leq 5\%$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat heteroskedastisitas.

2. Jika $P \text{ value} \geq 5\%$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.9 Pengujian Statistik

3.9.1 Uji Stastistik t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel *independen* secara individu terhadap variabel *dependen*. Uji t ini merupakan pengujian koefisien regresi masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen* untuk mngetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) selalu berpasangan, apabila salah satu ditolak maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat membuat keputusan yang tegas, yaitu apabila H_0 ditolak maka H_1 diterima (Sugiyono, 2012:87). Untuk menguji pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dapat dibuat hipotesa:

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel *independen* secara parsial terhadap variabel *dependen*.

H_1 = Terdapat pengaruh variabel *independen* secara parsial terhadap variabel *dependen*.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. $t \text{ statistik} < t \text{ tabel}$: artinya hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_1) ditolak, yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.

2. t statistik $>$ t tabel : artinya hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_1) diterima, yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.

3.9.2 Uji Statistik F

Uji F merupakan pengujian penghubung regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel *independen* bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependen*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikan nilai F.

H_0 = Secara bersama-sama variabel *independen* tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

H_1 = Secara bersama-sama variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. F statistik $<$ F tabel : artinya hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_1) ditolak, yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara bersama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.
2. F statistik $>$ F tabel : artinya hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_1) diterima, yang menyatakan bahwa variabel *independen* secara bersama mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependen*.

3.10 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil bermakna kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai yang mendekati 1 bermakna variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel *dependen*.